



# DPRD Minta BPK Audit PDAM Sintang

**SINTANG** - Penyakitnya sangat kronis dan sudah menaun. Karena itu, sudah selayaknya, BPK sudah dan PDAM Sintang untuk segera melakukan seleksi pemilihan direktur PDAM Sintang yang baru. "Kami minta proses audit ini tidak berjalan lama agar pemilihan direktur PDAM Sintang yang baru dapat segera dilaksanakan," desaknya.

Dukungan adanya audit terhadap PDAM Sintang juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sintang, Zaimuddin. Dia mengatakan pelaksanaan audit PDAM Sintang sudah sewajarnya dilakukan agar PDAM dapat sembuh dari sakunya. "Audit ini merupakan permintaan kawan sebagai syarat diberikannya penyertaan modal kepada

PDAM yang baru nanti enak dalam melangkah. Bejang menaun. Setelah proses audit selesai, Pemkab Sintang harus segera melakukan seleksi pemilihan direktur PDAM Sintang yang baru. "Kami minta proses audit ini tidak berjalan lama agar pemilihan direktur PDAM Sintang yang baru dapat segera dilaksanakan," desaknya.

Dukungan adanya audit terhadap PDAM Sintang juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sintang, Zaimuddin. Dia mengatakan pelaksanaan audit PDAM Sintang sudah sewajarnya dilakukan agar PDAM dapat sembuh dari sakunya. "Audit ini merupakan permintaan kawan sebagai syarat diberikannya penyertaan modal kepada

PDAM untuk satu liter air sebesar Rp4 liter sedangkan PDAM menjual air tersebut ke pelanggan hanya Rp2 liter. "Berarti PDAM harus nombok 100 persennya," ungkapnya. Ini baru persoalan produksi yang tidak sesuai. Untuk biaya operasional seperti gaji pegawai, listrik dan pembelian solar juga cukup besar. Gana men-jelaskan pendapatan PDAM dari 3.800 pelanggan hanya Rp300 juta per bulannya. Sementara untuk gaji pegawai yang jumlahnya 53 orang ini besarnya sudah mencapai Rp275 juta. Belum lagi bayar listrik Rp60 juta per bulan. Ana dan Sepauk yang meng-gunakan genset perbulannya mencapai Rp60-70 juta.

Dikatakannya, besarnya bi-

aya operasional ini karena solar yang dibeli oleh PDAM ialah dengan harga industri. Gana juga mengeluhkan soal jumlah pegawai PDAM yang melebihi rasio ideal. Jumlah pegawai yang besar ini menyebabkan biaya operasional untuk gaji pegawai menjadi tinggi. "Pegawai PDAM yang ada saat ini merupakan pegawai rekrutmen sebelum saya memimpin PDAM," katanya.

Gana mengungkapkan dalam evaluasi bersama Sekda beberapa waktu lalu, memang ada beberapa item yang akan dipangkas seperti gaji pegawai. Tapi Gana mempertanyakan apakah ini harus dilakukan karena sesuai undang-undang yang berlaku, gaji pegawai tidak boleh di bawah UMK yang telah ditetapkan. Jumlah

pegawai yang melebihi rasio yaitu mencapai 53 orang. "Tapi ini masih mending (lumayan) sekarang jumlahnya hanya 53 orang. Dulu saat baru saya masuk PDAM, jumlah-nya pegawai sangat banyak," ujarnya.

Dia mengatakan saat per-tama kali memimpin PDAM, pihaknya langsung memang-kas pegawai PDAM dengan melakukan PHK sebanyak 8 pegawai. "Tapi sekarang kalau harus mem-PHK karyawan lagi, kami harus ada dasarnya untuk mem-PHK tersebut," katanya. Gana mengungkapkan, ideal-nya jumlah pegawai PDAM ini sebanyak 45 orang. Personil lain, ungap Gana, PDAM ini sering dijuluki Perusahaan Datuk

Anak Menantu. Disinilah perusa-haan satu-satunya yang ada gawai, ada adik abang dan ada paman keponakan. "Di mana ada suami istri jadi pegawai di dalam satu perusahaan. Ini yang membuat tidak sehatnya perusahaan," tegasnya.

Persoalan infrastruktur juga jadi kendala PDAM. Sarana prasarana PDAM sebagian besar berusia uzur. Jaringan ban-yak yang bocor tapi sayangnya, PDAM tidak memiliki alat de-tekst kebocoran pipa jaringan. Tidak hanya itu, PDAM juga tidak memiliki mesin cadangan jadi jika mesin rusak, habislah air tidak mengalir. "Tak usah jauh-jauh, mobil pengangkut so-lar kami pernah terbakar tapi belum bisa diganti," ungkapnya. (tra)